

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 3



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

## Desak Gaji PJLP Jadi Rp 4,9 Juta

### Gambir, Warta Kota

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk meneken Keputusan Gubernur (Kegpub) penyesuaian gaji Petugas Jasa Lainnya-Perorangan (PJLP) menjadi Rp 4,9 juta per bulan.

Diketahui, para PJLP mengeluhkan, gaji mereka masih Rp 4,6 juta per bulan, belum disesuaikan seperti upah minimum provinsi (UMP).

"Kegpub-nya belum ditandatangani, itu yang kami perjuangkan, yang kami panggil-panggilin. Kami desak supaya segera keluar (Kegpub)," kata Mujiyono di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (20/6/2023).

Mujiyono mengatakan, saat ini draf Kegpub tersebut telah berada di meja Heru untuk diteken. Hal itu sebagaimana informasi yang dia terima dari Inspektorat DKI Jakarta.

"Katanya tadi dari Inspektorat sudah ada di mejanya pak Gubernur, tapi belum ditandatangani," imbuhnya.

Selain itu, kata Mujiyono, kekurangan gaji PJLP dari bulan Januari 2023 akan dirapel setelah Kegpub berlaku. Dengan demikian, regulasi yang dibuat itu berlaku surut.

Mujiyono mengaku, tak tahu penyebab terjadinya persoalan ini. Dia menduga, masa transisi kepemimpinan antara Anies Baswedan dengan Heru Budi Hartono menjadi salah satu penyebabnya.

"Iya (dirapel) mungkin karena adanya pergantian Gubernur kemarin ya, kelihatannya seperti itu," kata Mujiyono

yang juga menjadi Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini.

### Akan Dirapel

Sementara itu Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin juga mengatakan Kegpub belum ditandatangani.

"Belum ditandatangani (Kegpub) sama Pak Pj Gubernur. Mungkin lagi dicari bagaimana skemanya sesuai dengan aturan agar tidak kesalahan," kata Syarifudin usai rapat kerja dengan eksekutif pada Selasa (20/6/2023).

Syarifudin mengaku, banyak PJLP di DKI Jakarta yang mengadu kepadanya agar gaji mereka dinaikan seperti UMP. Kepada masyarakat, Syarifudin menjelaskan bahwa kekurangan gaji mereka dari bulan Januari

2023 kemarin, akan dirapel sampai regulasi tentang penyetaraan gaji seperti UMP telah diberlakukan.

"Ada beberapa yang mengadu ke saya juga (soal gaji) belum naik, karena gubernur sebelumnya kan katanya UMP Rp 4,9 juta. Tapi ternyata pas di cek gaji mereka masih Rp 4,6 juta," jelas Syarifudin.

Pria dari Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta ini berharap, Heru tak mengeluarkan pernyataan apa pun soal aturan gaji. Syarifudin berkeinginan, pembahasan soal gaji ini melibatkan DPRD DKI Jakarta.

"Saya berharap Gubernur kalau ada mau kenaikan kami dikasih tahu. Jadi jangan statement dulu baru dilaksanakan, kita (eksekutif dan legislatif) programkan dulu proses seperti ini, (kalau) oke lalu

anggaran ada kemudian di DPRD dibahas, dinaikan anggarannya baru ngomong," jelas Syarifudin.

Sementara itu Inspektorat DKI Jakarta mengungkap, surat Kegpub tentang penyesuaian gaji PJLP sudah siap. Artinya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tinggal meneken regulasinya.

Inspektur Pembantu I Andy Wibowo mengatakan informasi itu didapatnya dari Biro lain di Setkda DKI Jakarta. Dia menyebut, pihak yang menangani persoalan itu bukanlah Inspektorat, tapi organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

"Inspektorat itu hanya pengawas, bukan penyusun aturan terkait hal ini," ujar Andy usai rapat kerja dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta pada Selasa (20/6/2023). (faf)